

# REKOMENDASI DAN TINJAUAN STRUKTUR KURIKULUM PENGAJARAN DAN MODEL PEMBELAJARAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DI NEGARA NIGERIA

Zulkifli Alamsah Sutanto<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan,  
Universitas Tadulako

E-mail: \*<sup>1</sup>zulkifliamsah@untad.ac.id

## Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis berbagai rekomendasi Pendidikan kewarganegaraan dilihat dari tinjauan struktur kurikulum, pengajaran dan model pembelajaran di Negara Nigeria. Penelitian ini menggunakan metode literature review atau studi kepustakaan yang bertujuan untuk mengungkapkan berbagai teori yang berkaitan dengan masalah yang diteliti sebagai bahan referensi hasil penelitian, dengan berbagai tahapan yaitu pengumpulan data, analisis data yang ditemukan, dan menarik Kesimpulan. Data yang diperoleh dengan cara mengumpulkan buku-buku maupun jurnal dari jurnal nasional dan internasional yang berasal dari *google scholar*, *taylor and francis*, dan sumber terpercaya. Untuk analisis daranya menggunakan *critical appraisal*. Dimana proses analisis jurnal yang digunakan menjadi landasan teori bago perbedaan, persamaan dan kekurangan jurnal yang digunakan. Hasil penelitian 1). Dilihat dari struktur kurikulum, materi pada Pendidikan kewarganegaraan di negara Nigeria berdasarkan atas kelas-kelas, untuk kelas sekolah dasar dan sekolah menengah mempelajari ilmu-ilmu sosial dan masalah Kesehatan sedangkan untuk perguruan tinggi Pendidikan kewarganegaraan diajarkan sebagai mata kuliah umum yang membahas tentang olmu politik, pemerintah, dan demokrasi. 2). Pengajaran di Negara Nigeria dilakukan oleh guru yang disesuaikan dengan mata pelajaran dan kelasnya. Disisi lain, guru yang lebih berpengalaman dan lebih tua tentunya lebih mendukung keragaman dikelasnya. 3). Model pembelajaran di Negara Nigeria dalam Pendidikan Kewarganegaraan menggunakan model pembelajaran holistik.

**Kata kunci:** Nigeria, Model Pembelajaran, Pendidikan Kewarganegaraan, Pengajaran, Struktur Kurikulum.

## Abstract

*This study aims to analyze various recommendations for Civic Education in terms of curriculum structure, content, teaching, and learning models in Nigeria. The research uses a literature review method, which seeks to explore various theories related to the research topic as a reference for the findings. The process includes data collection, data analysis, and drawing conclusions. The data were obtained by collecting books and journals from national and international sources such as Google Scholar, Taylor and Francis, and other reliable sources. The data analysis used critical appraisal, which involves analyzing the selected journals to identify differences, similarities, and limitations among them. The results of the study are: 1) In terms of curriculum structure, Civic Education in Nigeria is organized by educational levels. At the primary and secondary levels, it focuses on social studies and health issue s, while at the university level, Civic Education is taught as a general course covering political science, government and democratic. 2) Teaching in Nigeria is conducted by teachers according to their subject and grade level. In addition, more experienced and older teachers tend to better support diversity in their classrooms. 3) The learning model used in Civic Education in Nigeria applies a holistic approach.*

**Keywords:** Nigeria, Learning Model, Civic Education, Teaching, Curriculum Structure

## PENDAHULUAN

Nigeria terdiri dari kebangsaan etnis yang berbeda dengan keberagaman nilai dan budayanya. Ada sekitar 250 kelompok etnos di Nigeria. Sebelum munculnya kolonialisme, kelompok-kelompok ini dikelola di bawah sistem administrasi yang terbagi atas wilayah-wilayah. Wilayah utara yang dikenal dengan Hausa/Fulani yang dominan mengoperasikan system emirate terpusat yang dipimpin oleh Emir, Diwilayah barat yang didominasi Yoruba, yang bersifat pemerintahan monarki yang dikombinasikan dengan berbagai elemen republikanisme liberal yang dioperasikan oleh Oba, diwilayah timur, system administrasinya Acephalous, tidak ada penguasa tradisional yang terlihat tetapi variasinya dari republikanisme. Konsep mempribumikan merupakan kekuatan yang dominan sehingga bertentangan dengan kewarganegaraan. Efeknya adalah perpecahan primordial

terhadap penyebab dan aspirasi etnis bahkan setelah penggabungan di tahun 1914 dari bekas protektorat utara dan Selatan bahkan di negara Nigeria pasca kemerdekaan.

Banyak sarjana telah mengemukakan titik fokus ideal pendidikan kewarganegaraan di Nigeria. Sifat isi kurikulum penerima menjadi perhatian utama tak lama setelah kemerdekaan pada tanggal 1 Oktober 1960. Kurikulum sekolah awal sangat didominasi oleh pengaruh penguasa kolonial Inggris dan sebagian besar disesuaikan dengan aspirasi Barat. Di Nigeria, itu adalah fitur yang menonjol bagi seorang anak untuk mengenal peristiwa di luar pantai Nigeria, sementara sangat pemula tentang apa yang terjadi di lingkungan terdekatnya. Peristiwa sejarah memiliki pengaruh besar pada nasionalisme dan pencapaian kebangsaan dan kewarganegaraan di Negara Nigeria. Seorang pria Yoruba, sebagai contoh, kemungkinan besar terutama memiliki kesetiaan kepada Emir karena pertimbangan nasional. Sikap yang sama terwujud di antara kelompok etnis lain. Hal ini membuat konsep kewarganegaraan menjadi realistis. Selain itu, multikulturalisme adalah ciri menonjol masyarakat Nigeria, permasalahan yang pernah tercatat adalah keterkaitan dengan politik dan nasionalisme sentry fugal. Selain itu Tingkat konflik agama dan etnis memprihatinkan. Misalnya krisis politik tahun 1960an bernada etnis dan agama. Krisis tersebut memuncak menjadi perang saudara antara tahun 1967 dan 1970. Contoh konflik etno-agama lainnya termasuk konflik Kasuwan Magani pada tahun 1980, krisis Kafanchan tahun 1987, Zango Kataf pada tahun 1984 dan 1992, krisis Tafawa Balewa pada tahun 1991, dll. Persaingan politik di antara kelompok etnis juga telah menyebabkan serangkaian krisis seperti kerusuhan Kano pada tahun 1953, pemberontakan Tiv pada tahun 1964, krisis Barat pada tahun 1952, gerakan hak Ogoni pada tahun 1990-an.

Mereka berargumen bahwa kewarganegaraan seharusnya tidak “mendefinisikan kebangsaan dalam hal identitas etnis, agama dan budaya.” Argumennya lebih jauh bahwa pengajaran pendidikan kewarganegaraan harus menumbuhkan semangat nasionalisme daripada etnosentrisme dan kecenderungan individualistis. Bidang perhatian lainnya adalah orientasi dan penanaman nilai. Aspek ini jelas tercermin dalam kurikulum PKn baru untuk sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. Orientasi hak asasi manusia juga menikmati fokus yang lebih luas di kalangan penulis Nigeria terutama di antara teks-teks yang digunakan di sekolah menengah. Pengelolaan komponen politik, ekonomi, dan sosial sistem Nigeria tidak selalu menghasilkan hasil yang sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan menciptakan persatuan yang sangat diinginkan di negara tersebut (Omotuyi, 2016).

Ruang untuk keterlibatan warga negara sangat penting bagi demokrasi dan operasi masyarakat sipil. Baik ruang-ruang ini ada secara daring maupun luring, ruang-ruang tersebut semakin berubah menjadi katalisator bagi perubahan sosial dan politik. Dengan kecepatan yang sama, pemerintah mengusulkan atau mengadopsi langkah-langkah yang dirancang untuk membatasi ruang-ruang ini, dengan implikasi pada kebebasan fundamental, khususnya hak-hak kebebasan berekspresi, berkumpul di tempat umum, hati nurani, dan berpikir. Akibatnya, ruang-ruang sipil berada di bawah pengawasan dan pelecehan serius oleh otoritas pemerintah, yang mempersulit kelompok-kelompok masyarakat sipil untuk melaksanakan advokasi atau operasi amal mereka (Ibezim Ohaeri, 2017). Pemerintahan Nigeria terbagi atas pemerintah federal, 36 negara bagian dan ibu kota Abuja, serta 774 pemerintah daerah. Pemerintah federal, negara bagian, dan daerah berbagi pendapatan nasional dan tanggung jawab kebijakan. (Galston, 20017).

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan dan metode penelitian kepustakaan atau literature research. Teknik ini digunakan dengan tujuan mengungkap berbagai teori yang berkaitan dengan masalah yang diteliti sebagai acuan pembahasan hasil penelitian. Dalam metode pencarian literatur, buku dan jurnal dikumpulkan dari berbagai sumber, antara lain jurnal nasional dan internasional di database *Google Scholar* dan berbagai buku dan

sumber di internet. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dari tahapan pencarian sumber artikel dan buku berdasarkan topik garis besar pada artikel, pengelompokkan artikel yang terbagi atas relevansi dengan topik dan tahun penelitian selanjutnya yaitu pengurutan struktur penjelasan serta perbandingan data yang terkait dengan artikel. Dalam pencarian artikel dari rentang tahun 2015-2025 untuk penjelasan pengertian kewarganegaraan. Data dari studi literatur dalam penelitian ini dikumpulkan dalam bentuk artikel jurnal dari database *Google Scholar*. Analisis data Analisis jurnal dalam studi literatur ini menggunakan teknik *critical appraisal*. Evaluasi kritis adalah proses analisis jurnal yang berfungsi sebagai landasan teori atas perbedaan, persamaan dan kekurangan jurnal yang digunakan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Struktur kurikulum pendidikan kewarganegaraan di NegaraNigeria**

Pengembangan kurikulum pendidikan kewarganegaraan di Nigeria relatif rendah dibandingkan dengan keaksaraan, seni, ilmu pengetahuan dan bahkan teknologi. Meskipun secara implisit telah disinggung dalam rekomendasi Konferensi Kurikulum Nasional 1969, tujuan dari pendidikan kewarganegaraan disamakan dengan tujuan-tujuan lain dalam Pendidikan IPS. Beberapa rekomendasi inti yang membentuk dasar untuk pendirian pendidikan kewarganegaraan. Konferensi Kurikulum Nasional berlangsung November 1969 di Majelis Nasional, Hall La gos. Sebagai tindak lanjut dari konferensi ini adalah diadakannya Seminar Nasional pada tahun 1973, dimana rekomendasi-rekomendasi dari Munas 1969 dibahas dan akhirnya direalisasikan menjadi Kebijakan Nasional Pendidikan. Kebijakan tersebut pertama kali diterbitkan pada tahun 1977. Dari Konferensi Munas tersebut menghasilkan poin-poin dalam pendidikan kewarganegaraan di Nigeria yaitu:

1. Pendidikan Nigeria harus mengarah pada realisasi diri, hubungan manusia yang lebih baik; efisiensi ekonomi diri dan nasional, kewarganegaraan yang efektif, kesadaran nasional, persatuan nasional.
2. Rencana Pembangunan Nasional Kedua yang kemudian diadopsi sebagai tujuan Nasional memberikan kepercayaan dan dorongan untuk memasukkan pendidikan kewarganegaraan ke dalam kurikulum yang mencakup masyarakat yang bebas dan demokratis, masyarakat yang hebat dan dinamis serta perluasan wilayah yang cerah dan penuh untuk semua warga negara.

Professor Godswill Obioma yang berkedudukan sebagai Sekretaris Eksekutif Dewan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan (badan yang bertanggung jawab atas Pengembangan Kurikulum di Nigeria), dia mencatat bahwa kurikulum mencerminkan kedalaman, kesesuaian, dan keterkaitan isi kurikulum. Kurikulum diperkenalkan untuk mencapai Tujuan Pembangunan Milenium pada tahun 2015 dengan perluasan, kebutuhan untuk menerapkan fokus pada inti dan Strategi Pembangunan dan Pemberdayaan Ekonomi Nasional (NEEDs), yang berorientasi pada nilai, pemberantasan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, penciptaan kekayaan dan pendidikan untuk memberdayakan masyarakat, tak terkecuali pendidikan kewarganegaraan. Oleh karena itu, adanya keterkaitan literasi digital dengan kewarganegaraan diyakini memungkinkan masyarakat untuk menyampaikan pandangan mereka di depan umum atau berkumpul untuk berdiskusi dan memberikan komentar tentang isu-isu sosial, seperti partisipasi politik pemuda Nigeria, khususnya selama pemilihan presiden tahun 2023, di mana platform digital diciptakan untuk mempromosikan Gerakan Kepatuhan, yang menguntungkan Peter Obi, salah satu calon (Bessong et al., 2024).

Perguruan tinggi di Negara Nigeria dalam pendidikan kewarganegaraan diajarkan sebagai mata kuliah umum, isinya terbatas pada beberapa konsep dasar ilmu politik. Sedangkan yang diajarkan dalam mata pelajaran tersendiri (pemerintahan) di tingkat sekolah menengah. Topik-topik seperti pemerintahan dan konsep dalam pendidikan kewarganegaraan seperti demokrasi, monarki, sosialisme, partai politik, sistem politik, kekuasaan dan otoritas sebagian besar menjadi fokus dalam struktur

kurikulum. Untuk mempertahankan dan mengkonsolidasikan demokrasi warga negara diajarkan dan dibuat untuk menginternalisasi tujuan demokrasi. Hal ini sejalan dengan (Osai, 2023) yang mengatakan Nigeria adalah negara yang beragam dengan banyak kelompok etnis, bahasa, latar belakang, dan kepercayaan agama, membutuhkan individu yang aktif, dinamis, bersatu, kritis, dan berpengetahuan luas. Oleh karena itu, pendidikan kewarganegaraan merupakan isu penting yang kaya akan cita-cita sosial yang mendasarinya dan dibutuhkan untuk hidup dalam masyarakat yang terus berubah dan demokratis. Nilai-nilai seperti kebebasan, pelayanan, keadilan, persamaan agama dan toleransi harus ditanamkan. Sifat-sifat negatif seperti kekerasan agama, perampokan bersenjata, pembunuhan ritual, praktik kenegatifan dalam pemilu, korupsi pejabat harus dikutuk dan diisolasi dari kehidupan pribadi dan berbangsa. Misalnya sikap siswa sekolah menengah atas terhadap keterlibatan warga negara dalam penelitiannya (Bilqees Olayinka & Sola Elijah, 2019) adalah berdampak negatif. Sehingga para siswa harus diberi pencerahan dan disarankan untuk berpartisipasi dalam keterlibatan warga negara seperti bakti sosial dan lain-lain, untuk mengembangkan sikap positif terhadap keterlibatan warga negara.

Disisi lain, warga negara harus menyadari fakta bahwa nilai-nilai demokrasi tidak tertanam dalam kode genetik. Mereka berevolusi dari waktu ke waktu dan setiap generasi dapat menentukan nilai-nilai dan model. Hal ini sesuai apa yang dikatan oleh Huber & Kuncel (2016) menemukan bahwa siswa menjadi lebih baik dalam berpikir kritis saat kuliah, namun pilihan jurusan mereka tidak memberikan banyak perbedaan. Berpikir kritis dapat bermanfaat pada setiap orang dalam smemahami dan menyelesaikan suatu permasalahan yang ada. Berpikir kritis sebagai unsur yang penting dalam pembentuk pola perilaku yang tepat bagi setiap insan manusia, baik sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Setiap individu manusia yang berpikir kritis dapat menganalisis pemikiran tentang tugasnya secara terkontrol sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku dalam kehidupannya (Sutanto & Murdiono, 2025).Inovasi terbesar dari negara Nigeria dalam struktur kurikulum terhadap pembelajaran kewarganegaraan dan cita-cita demokrasi perwakilan adalah adanya pengenalan pendidikan kewarganegaraan ke sekolah dasar dan menengah pada tahun 2007. Aspek pendidikan kewarganegaraan mencakup dan terdiri dari pendalaman kurikulum IPS yang telah mengalami restrukturisasi. Kurikulum pendidikan kewarganegaaran pada sekolah dasar dan sekolah menengah dipisahkan, dirancang, dan terpisah satu sama lainnya. Sehingga dapat memperbaiki kualitas kurikulum yang ada di negara Nigeria. Hal ini dapat dilihat pada tabel

Tabel 1. Kurikulum PKn sekolah dasar di Negara Nigeria

Nilai	Topik
Utama satu	Pendidikan kewarganegaraan, lambing negara, perilaku sosial yang baik dan masalah kesehatan.
Utama dua	Pendidikan kewarganegaraan, sekolah, masyarakat dan masalah kesehatan.
Utama tiga	Pendidikan kewarganegaraan, kesadaran berbangsa, tugas, dan tanggung jawab serta kesehatan.
Utama empat	Nilai-nilai kewarganegaraan, kesadaran nasional, tugas dan tanggung jawab, pemerintahan, otoritas konstitusi, social, dan masalah Kesehatan.
Utama lima	Pendidikan kewarganegaraan, kewarganegaraan, kesadaran kebangsaan, tugas dan tanggung jawab, pemerintah, perwakilan demokrasi, masyarakat sipil dan partisipasi warga negara.

Utama enam	Pendidikan kewarganegaraan, nilai-nilai kesadaran dan identitas nasional, pemerintahan dan siil Masyarakat serta partisipasi masyarakat.
------------	--

Tabel 2. Kurikulum PKn Sekolah Menengah di Negara Nigeria

Nilai	Topik
JS 1	Kewarganegaraan, kesadaran nasional dan identitas, demokrasi perwakilan, konstitusi Nigeria, hak asasi manusia, hak dan kewajiban warga negara Nigeria dan masalah sosial
JS 2	Nilai kewarganegaraan, hak dan aturan hukum, konstitusi Nigeria dan masalah sosial
JS 3	Hak Asasi Manusia dan Aturan Hukum, Konstitusi Nigeria, Demokrasi perwakilan, tugas dan tanggung jawab warga negara, masalah social, kehidupan ekonomi nasional dan perdamaian konflik

Sumber: Dewan Pengembangan Penelitian dan Pendidikan Nigeria, Tahun 2007

### **Pengajar dan Model Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di negara Nigeria**

Guru studi sosial Nigeria dalam sampel ini umumnya mendukung pemikiran, konsep, dan keterampilan yang melekat di sekolah dasar. program pendidikan kewarganegaraan mempersiapkan siswa untuk hidup sebagai anggota aktif dari masyarakat demokratis. Pendidikan Kewarganegaraan yang mencakup materi ilmu sosial adalah salah satunya bagi guru untuk mengajarkannya kepada siswa di sekolah dasar dan menengah. Pendidik kewarganegaraan dapat terlibat dalam eksplorasi yang disarankan melalui diskusi kelas awal dan penyelidikan sebelum penyampaian instruksi utama untuk mengidentifikasi dan menggunakan strategi yang dapat menghalangi identitas kewarganegaraan yang negatif dan mendorong identitas kewarganegaraan yang positif. Hal ini akan mendorong pendidikan kewarganegaraan yang bermakna di Nigeria, yang dapat mencegah rendahnya keterlibatan kewarganegaraan di antara orang dewasa. Pendidik orang dewasa juga harus mengingat latar belakang yang berbeda dari pelajar dewasa dalam penerapan pendidikan kewarganegaraan mereka (Ajaps & Obiagu, 2020)

Mereka mendefinisikan pendidikan ilmu sosial terutama dalam kaitannya dengan bidang konten seperti sejarah pendidikan dan kedua dalam kaitannya dengan pendidikan kewarganegaraan. Dalam kasus ini berfokus pada imu sosial tertentu pada diri siswa seperti ekonomi, di mana seorang siswa mengkhususkan dirinya di bidang ekonomi daripada pada sosial. Mereka mungkin tidak memiliki pandangan holistik tentang studi sosial seperti mengintegrasikan ilmu-ilmu sosial ke dalam kurikulum yang membantu perkembangan anak dapat berfungsi secara efektif dalam masyarakat demokratis. Konten yang terjadi ketika terdapat ujian sekolah menengah regional di Afrika Barat yang menguji siswa dalam ilmu sosial tertentu bukan sosial studi. Di tingkat sekolah dasar, ilmu sosial lebih umum konsepsi daripada di tingkat sekunder tetapi mungkin dikuasai oleh latar belakang guru sendiri yang disesuaikan dengan jika dia memiliki spesialisasi bidangnya. Namun, kurangnya dukungan yang diberikan dalam keragaman seringkali hanya berdasarkan konsep dasar untuk meyakini adanya demokrasi, sehingga akan adanya persatuan. Persatuan adalah tujuan nasional yang begitu penting terutama dalam keberagaman harus ada dan diakui, didiskusikan, dan diapresiasi. Untuk mencapai persatuan setiap kelompok harus menyerahkan beberapa tradisi budaya dan kekuatannya. Kelompok etnis tidak akan membuat

pengorbanan itu kecuali mereka yakin akan kelangsungan sebagian dari budaya mereka. Kepastian ini hanya dapat datang melalui pengakuan keberadaannya, Sekolah harus meyakinkan siswa tentang nilai warisan mereka sambil memungkinkannya mereka memberikan sebagian darinya untuk mencapai persatuan.

Guru yang lebih berpengalaman dan lebih tua lebih mendukung keragaman sebagai konsep yang diperlukan untuk keyakinan demokratis. Hal ini menunjukkan bahwa pembentukan kader guru yang berpengalaman pada akhirnya dapat menghasilkan program pendidikan kewarganegaraan yang lebih mengakui peran guru tentang keragaman dalam negara demokrasi. Subjek menunjukkan konsep yang menurut mereka cocok untuk anak muda pada jenjang sekolah dasar dapat diidentifikasi melalui keterampilan yang harus diperoleh siswa sebagai warga negara. Disisi lain, Keterampilan membaca diidentifikasi sebagai hal yang penting. Keterampilan partisipasi sosial dan kelompok juga dianggap penting. Kemampuan intelektual, pengambilan keputusan, tidak didukung dengan baik. Selain itu, di berbagai negara bagian di Nigeria, hak-hak penduduk asli mengecualikan hak-hak kepada kelompok non-pribumi. Misalnya, berbagai negara bagian memberhentikan pekerja non-pribumi dari layanan negara mereka dan mendeportasi non-pribumi yang tidak produktif dari kota-kota mereka (Obiagu & Ajaps, 2022). Mungkin subjek percaya ini adalah keterampilan yang paling baik diajarkan di sekolah menengah. Studi ini dianggap bahwa guru Nigeria mendukung nilai-nilai yang berkaitan terhadap hak individu, kebebasan individu, tanggung jawab individu, dan kondisi sosial dan tanggung jawab. Dukungan kuat ditemukan untuk dimasukkannya berbagai nilai dalam kurikulum. Namun, ada sedikit dukungan untuk kebebasan mengejar cara hidup. Ini mungkin mencerminkan pemahaman tentang kekuatan berbagai etnis kehidupan, dan kontribusi positif mereka kepada bangsa, sambil menunjukkan kesadaran bahwa beberapa cara hidup tersebut telah dan akan terus berlanjut bertentangan dengan tujuan nasional. Hal ini sejalan dengan (Obiagu, 2019) yang mengatakan guru kewarganegaraan kurang memiliki latar belakang pelatihan dalam pendidikan kewarganegaraan dan tidak menggunakan metode partisipatif dan eksperiensial dalam instruksi pendidikan kewarganegaraan. Selain itu, guru kewarganegaraan tidak terlibat dalam pembelajaran seumur hidup atau memanfaatkan layanan TIK untuk pengayaan konten instruksional kewarganegaraan.

## SIMPULAN

Berdasarkan analisis hasil struktur kurikulum, pengajaran, dan model pembelajaran pendidikan kewarganegaraan di negara nigeria yaitu Pengembangan kurikulum pendidikan kewarganegaraan di Nigeria relatif rendah dibandingkan dengan keaksaraan, seni, ilmu pengetahuan dan bahkan teknologi. Meskipun secara implisit telah disinggung dalam rekomendasi Konferensi Kurikulum Nasional 1969, tujuan kewarganegaraan yang baik disamakan dengan tujuan-tujuan lain dalam Pendidikan IPS. Beberapa rekomendasi inti yang membentuk dasar untuk pendidikan kewarganegaraan. Konferensi Kurikulum Nasional berlangsung November 1969 di Majelis Nasional, Hall La gos. Disisi lain Guru studi sosial Nigeria dalam sampel ini umumnya mendukung pemikiran, konsep, dan keterampilan yang melekat di sekolah dasar. Program pendidikan kewarganegaraan mempersiapkan siswa untuk hidup sebagai anggota aktif dari masyarakat demokratis. Guru yang lebih berpengalaman dan lebih tua lebih mendukung keragaman sebagai konsep yang diperlukan untuk keyakinan demokratis. Hal ini menunjukkan bahwa pembentukan kader guru yang berpengalaman pada akhirnya dapat menghasilkan program pendidikan kewarganegaraan yang lebih mengakui peran guru.

## DAFTAR RUJUKAN

- Ajaps, S. O., & Obiagu, A. N. (2020). Increasing Civic Engagement Through Civic Education: A Critical Consciousness Theory Perspective. *Journal of Culture and*  
<https://ejournal.undaris.ac.id/index.php/waspada>

*Values in Education*, 4(1), 64–87.

- Bessong, C. D., Ewuru, A. A., Bessong, N. O., Omang, T. N., Olori, G. I., Patrick, E. O., Olofu, A. P. (2024). Digital literacy and its effect on learners ' civic engagement in adult and vocational education in Nigeria Literasi digital dan pengaruhnya terhadap keterlibatan kewarganegaraan peserta didik pada pendidikan dewasa dan kejuruan di Nigeria, 418–431.
- Bilqees, Olayinka, A.R., & Sola Elijah, O. (2019). Level of Civic Knowledge and Attitude as Antidotes of Civic Engagement among Secondary School Students in Oyo State, Nigeria. *International Journal of Education and Literacy Studies*, 7(4), 124.
- Galston, W. A. (20017). Political Knowledge , Political Engagement , and Civic Education. *Assessment*, 4(1), 217–234. Retrieved from [www.annualreviews.org](http://www.annualreviews.org)
- Huber, C. R., & Kuncel, N. R. (2016). Does College Teach Critical Thinking? A Meta-Analysis. *Review of Educational Research*, 86(2), 431–468.
- Ibezim, O. V. (2017). Confronting closing civic spaces in Nigeria. *Sur*, 14(26), 129–140.
- Obiagu, A. N. & Ajaps, S. O. (2022). Civic Engagement in Nigeria: A New Sociopolitical Development Perspective. *International Journal of Social Sciences & Educational Studies*, 9(1), 128–147.
- Obiagu, A.N. (2019). Influence of Teacher's Characteristics on Civic Education Implementation in Nigeria. *Journal of Culture and Values in Education*, 2(2), 1–20.
- Omotuyi, S. (2016). Electoral Process and Neo-Patrimonialism: An Appraisal of Quality of Governance in Democratic Nigeria. *Global Journal of Human- Social Science: Political Science*, 16(3)
- Osai, A. G. (2023). Citizenship Education in Nigeria as an Alternative to National Unity. *JIE (Journal of Islamic Education)*, 8(2), 124–137.
- Sutanto, Z. A., & Murdiono, M. (2025). Faktor Pendukung Penguatan Keterampilan Berpikir Kritis Peserta Didik Melalui Penerapan Model Pembelajaran Seminar Socrates, 10(1), 69–77.